

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abas, *Legitimasi & Politik Kebijakan Teori dan Praktik*. Depok: Altama Depok, 2017.
- Ahmad Erani Yustika, *Tapak Pengembangan Industri Nasional*, Cetakan Ke 1 Bogor: IPB Press, 2014
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Upaya membingkai Peradaban*. Cetakan Ke 3. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Al Khanif, dkk. *Pancasila, Transnasionalisme dan Kedaulatan Negara*, Cetakan Ke 1 Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian UU Terhadap UUD 1945*, Cetakan Ke 1, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Dhianta, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum dan Normatif (Dalam Jusifikasi Teori Hukum)*. Cetakan Ke 3. Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2019.
- Hasan Baharun, Akmal Mundiri, dkk. *Metodologi Studi Islam, Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2020
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan: Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2015
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018.
- Nikolas Simanjuntak, *Hak-Hak Asasi Manusia: dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. (Jakarta: Erlangga, 2017).
- Sidabalok Janus, *Hukum Perdagangan: Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional*: Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1980.
- Soemantri Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- Suparji, *Pengaturan Perdagangan Internasional: UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Jakarta Selatan: Uai Press ISBN: 978-623-90930-2-0, 2014.
- Syukri, Pahmi, Iwan, dan Faury Ahmad. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung: Fokus Media, 2018

JURNAL/SKRIPSI/WEBSITE

- Aulia, Asdi. 2008. “Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia”. Vol. 4.
- Bambang Sutiyoso, Desember 2010. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Available at Jurnal Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Bernardus Wishman Siregar, *Perdagangan Internasional*. Available at Modul Pertemuan 10 Ekonomi Makro.
- Diky Pranata Kusuma, “Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi RI Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. Dosen STAI Ma’arif Jambi.
- Efi Yulistyowai, Endah, Tri Mulyani, 2016. “*Penerapan Konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan RI Studi Komparatif atas UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*”. (Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, 12640)
- Hertanti, Rachmi. (2019). “Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat”. *Indonesia for Global Justice*
- Hutagalung, Irfan. 2014. “*Tinjauan Kritis Atas UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kegagalan Undang-Undang Dalam Membatasi Kekuasaan Pemerintah Atas Pengikatan Kepada Perjanjian Perdagangan Bebas. Indonesia for Global Justice*
- Indrawati, N. (2020). “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018”. (Law Development & Justice Review, 3).

Kusumaningrum, Adi. 2015. “Reposisi Politik Hukum Perjanjian Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum di Indonesia”. Universitas Brawijaya Malang.

Merdekawati, Agustina. 2012. “Konsekuensi pembatalan undang-undang ratifikasi terhadap keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian internasional”. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Artikel Penelitian, (55281)).

Rizal Faiz Mahtum, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018*, dalam Skripsi UIN Sunan Ampel, (Surabaya: 2021)

Redi, Ahmad, S.H, M.H, Sistem Penyelenggaran Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia (<https://pusdik.mkri.id>)

Wijayanti, Ruth Elisa, (2021). *Perdagangan Internasional: Pengertian, Manfaat dan Dampak Negatifnya*.

Thahir, Trimayasari A. 2017 “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kerjasama Ekonomi ACFTA (Asean China Free Trade Area) Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN/KEPUTUSAN

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 11 ayat (1), (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), (4).

Tap MPR Pasal 1 Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nomor 12 Tahun 2011 Juncto UU No 15 Tahun 2019 Pasal 7

Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 10

Undang-Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 83-84

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor Perkara 13/PUU-XVI/2018.